

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN
Nomor: 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr. TENTANG PENCABUTAN
HIBAH ATAS BARANG JAMINAN**

SKRIPSI

Oleh :

SITI AINUL FARIDA

NIM. C92217108



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Ainul Farida

NIM : C92217108

Fakultas/Jur./Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor: 2217/Pdt.G/2019/Pa.Mr. tentang Pencabutan Hibah atas Barang Jaminan”

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Nganjuk, 23 Maret 2021

Yang membuat pernyataan




Siti Ainul Farida
NIM. C92217108

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Ainul Farida NIM. C92217108 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 22 Maret 2021

Pembimbing,



Drs. Nurhayati, M.Ag.
NIP: 196806271992032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Ainul Farida NIM. C92217108 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 05 Mei 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. Nurhayati M. Ag
NIP. 196806271992032001

Penguji II



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah M. Ag
NIP. 196303271999032001

Penguji III



Agus Solikin S.Pd. M.Si
NIP. 198608162015031003

Penguji IV



Ahmad Safiudin R. M.H
NIP. 199212292019031005

Surabaya, 05 Mei 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan M. Ag

NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Ainul Farida
NIM : C92217108
Fakultas/Jurusan : Syariah & Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : sitiainulfarida249@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM

PUTUSAN NOMOR: 2217/PDT.G/2019/PA.MR. TENTANG PENCABUTAN HIBAH

ATAS BARANG JAMINAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Juni 2021

Penulis

(SITI AINUL FARIDA)

Sesuai dengan kesimpulan diatas, maka disarankan, pertama: lembaga keuangan syariah seharusnya selalu mempertimbangkan kepentingan para pihak dengan memiliki komitmen untuk memperbaiki kondisi debitur yang telah memiliki itikad baik. kedua, Majelis Hakim dalam berpendapat seyogianya menggunakan diksi-diksi yang tepat agar tidak menimbulkan pemaknaan ganda yang dapat menimbulkan salah tafsir. ketiga, bagi masyarakat atau nasabah agar selalu mencatat secara rinci dan detail semua transaksi yang berkaitan dengan perpindahan peralihan hak atas tanah atau transaksi lainnya dengan disertai tanda-tangan pihak-pihak yang bersangkutan dan juga disertai dua orang saksi.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN BIMBINGAN	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II HIBAH DAN JAMINAN	22
A. Hibah	22
1. Pengertian Hibah	22
2. Dasar Hukum Hibah	23
3. Rukun dan Syarat Hibah	25
4. Kadar dan Kapasitas Hibah	27
5. Macam-Macam Hibah	29
B. Jaminan	30
1. Jaminan Dalam Hukum Islam	30
2. Dasar Hukum Jaminan	32
3. Macam-Macam Jaminan dalam Hukum Islam	33
4. Eksekusi Jaminan Dalam Islam	35

Dalam proses upaya pemenuhan kebutuhan akan rumah tersebut tidak dapat dipungkiri berpotensi adanya suatu konflik. Sebagai tindakan preventif kemungkinan timbulnya konflik atau sengketa, diperlukan suatu lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang mempunyai kredibilitas dan berkompeten sesuai bidangnya yaitu bidang ekonomi syariah. Secara yuridis, terdapat beberapa landasan hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam surat Al Hujurat ayat 9:⁶

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

⁶ KEMENAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan dan Tafsir bil Hadis*, (Bandung: Cordoba, 2014), 516.

Dalam hal ini Para penggugat merasa dirugikan karena hibah Penggugat I kepada Tergugat II telah dicabut sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Nomor : 0541/Pdt.G/2018/PA.Mr Tanggal 11 Juli 2018. Pencabutan hibah tersebut dikarenakan pihak penerima hibah melanggar perjanjian hibah bersyarat yang diberikan oleh pihak pemberi hibah. Pencabutan hibah yang dilakukan tersebut diperbolehkan menurut undang-undang karena telah diatur dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Maka dari itu segala akibat yang tersangkut dengan tindakan hukum berkaitan dengan subyek dan obyek perkara bertentangan dengan hukum yang berdampak pada perbuatan yang bersangkutan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sesuai yang tercantum pada Pasal 1365 KUHPerdata.⁹

⁹ Berkas Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 2217/PDT.G/2019/PA.MR

5. Analisis hukum Islam tentang pertimbangan hukum hakim terhadap pencabutan hibah atas barang jaminan dalam putusan Nomor 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr

Dari beberapa masalah yang timbul diatas, penulis membatasi masalah yang akan diteliti agar dalam pembahasan tulisan ini sesuai dengan sasaran yang diinginkan, maka penulis memberi batasan masalah sehingga bisa ditentukan mana saja yang masuk dan mana saja yang tidak masuk dalam masalah yang akan dibahas, diantaranya yaitu:

1. Pertimbangan hakim tentang pencabutan hibah atas barang jaminan dalam putusan Nomor 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr
2. Analisis hukum Islam tentang pertimbangan hakim terhadap pencabutan hibah atas barang jaminan dalam putusan Nomor 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diperoleh yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang pencabutan hibah atas barang jaminan dalam putusan Nomor 2217/PDT.G/2019/PA.MR?
2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang pertimbangan hukum hakim terhadap pencabutan hibah atas barang dalam putusan Nomor 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah *literature review* atau kegiatan mencermati, mendalami, mengidentifikasi dan menelaah pengetahuan. Kajian pustaka lebih

Ade Apriani Syarif dalam skripsi ini yang ditulis pada tahun 2017 dari Universitas Hasanuddin, yang berjudul: “Tinjauan Terhadap Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor : 432/Pdt.G/2012/PA.Prg)”. Dari penelitian ini ini dapat disimpulkan penulis memaparkan mengenai kedudukan hukum hibah dari orangtua kepada anaknya dalam hukum Islam. Perbedaan mendasar antara hibah pada umumnya dan hibah antara orang tua dan anak adalah adanya kebolehan yang diberikan oleh aturan dalam hukum Islam kepada orang tua untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya, sedangkan penarikan hibah yang bukan antara orangtua dan anak secara tegas dilarang dalam hukum Islam. Pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Pinrang terhadap ketentuan hukum Islam menyangkut penarikan hibah orang tua terhadap anaknya pada kasus tersebut kurang tepat. Hakim dalam kasus ini masih kurang memperhatikan bahan pertimbangan untuk

[illegible]

orangtua kepada anak.

Nida Lintang Kusuma dalam skripsi ini yang ditulis pada tahun 2020 dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0519/Pdt.G/2013/Pa.Ska Tentang Kedudukan Barang Jaminan Dalam Transaksi Murābahah”. Dari penelitian ini diketahui bahwa perkara gugatan tentang kedudukan barang jaminan, duduk perkara gugatan tentang penjualan barang jaminan dianggap merugikan penggugat, dalam hal ini penggugat meminta Majelis Hakim untuk membatalkan lelang barang jaminan tersebut. Majelis Hakim memutuskan dalam perkara ini menolak seluruh petitum penggugat dengan pertimbangan hukum pasal 1352 dan Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 181 HIR, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36 tentang ingkar janji sebagai pertimbangan hukum. Sehingga pelelangan yang dilakukan pihak tergugat majelis hakim berpendapat sah berdasarkan pasal 11 ayat (2) butir e Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Sedangkan menurut hukum Islam eksekusi barang jaminan yang dilakukan sebelum jatuh tempo tidaklah sah. Karena eksekusi barang jaminan

[illegible]

Persamaan dengan skripsi yang dikaji oleh penulis sekarang ini yaitu terletak pada skripsi penulis ini yang sama-sama menganalisis putusan Mahkamah Agung. Selain itu, pada kasus skripsi ini pengajuan gugatannya sama-sama terkait dengan barang jaminan.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang pencabutan hibah atas barang jaminan dalam putusan Nomor 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam tentang pertimbangan hukum hakim terhadap pencabutan hibah atas barang jaminan dalam putusan Nomor 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr.

¹⁵ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2013), 106-107.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sebagaimana suatu penelitian yang memiliki kegunaan masing-masing, maka penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin ilmu secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Manfaat secara teoritis

- a. Untuk meningkatkan wawasan keilmuan bagi para pembaca terkait sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama serta memberikan sumbangsih dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum ekonomi syariah
- b. Memberikan kontribusi berupa buku bacaan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat secara praktis

- a. Sebagai tolok ukur sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan dengan jalur hukum yaitu peradilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Penelitian skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi Perbankan Syariah yang mana dalam tahap analisa atau survei agunan yang akan dijadikan jaminan dengan sangat hati-hati agar kedepannya tidak timbul permasalahan.

G. Definisi Operasional

1. Hukum Islam

[illegible]

Dalam penelitian ini, yang dimaksud hukum Islam adalah teori tentang hibah dan jaminan yang diatur dalam Fiqh, Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Fatwa DSN MUI.

2. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum hakim adalah alasan-alasan dan dasar-dasar Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang memuat hukum tertulis (pasal-pasal peraturan di perundang-undangan) atau hukum tidak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara pencabutan hibah atas barang jaminan¹⁹. Implikasi pertimbangan putusan hakim yang mengenyampingkan Kompilasi Hukum Islam pasal 210 dan pasal 212 dalam dasar pertimbangan putusannya didasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 terkait dengan gugatan pencabutan hibah dari orang tua kepada anak yang objek tersebut masih dalam jaminan utang pada lembaga keuangan syariah harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dapat merugikan pihak ketiga yakni Bank Syariah (Tergugat III).

3. Putusan pengadilan No. 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr

Putusan pengadilan No. 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr merupakan produk hukum keputusan Hakim di Pengadilan Agama Mojokerto tentang kasus sengketa pencabutan hibah atas barang jaminan. Dalam penelitian yang akan dibahas, pencabutan hibah yang dilakukan orang tua kepada anak dilakukan

¹⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 889

a. Penyuntingan (*Editing*), dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa kembali dari data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Bagaimana tentang data yang berhubungan dengan putusan Pengadilan Agama Mojokerto No. 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr serta data sekunder yang penulis peroleh dari studi kepustakaan.

b. *Organizing*, dilakukan dengan tujuan untuk mengatur dan menyusun data yang diperoleh, sehingga dapat menghasilkan bahan-bahan untuk menentukan deskriptif. Pengaturan dan Penyusunan data yang dilakukan penulis yaitu dengan cara mencari sumber data pada putusan No. 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr sehingga dapat menghasilkan bahan-bahan untuk menentukan deskriptif.

Analisis data yaitu proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh agar dapat mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain.²³ Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif yuridis, yaitu pengumpulan data berupa kata-kata. Penelitian deskriptif ini berisi kutipan data-data, berasal dari

²³ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), 90-91.

Langkah pertama yang dilakukan penulis dalam analisis data yaitu pengumpulan data, setelah data terkumpul selanjutnya penulis mengolah dan memilah serta data yang tidak relevan di buang, kemudian dijadikan penyajian data untuk ditarik kesimpulan. Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif, oleh karena itu penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan logika induktif yakni menganalisis data yang terkumpul dengan cara menguraikan teori-teori dan fakta hukum yang ada sebagai pisau analisis terhadap putusan hakim dalam perkara No. 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr tentang pencabutan hibah atas barang jaminan yang menyebabkan terjadinya lelang kemudian dianalisa menurut hukum Islam sehingga didapatkan suatu kesimpulan.

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dengan susunan bab dan subbab agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini. Sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB II

HIBAH DAN JAMINAN

A. Hibah

1. Pengertian Hibah

Kata hibah diambil dari Bahasa Arab kemudian diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini merupakan masdar dari kata **وَهَبَ - يَهَبُ - هِبَةً** yang memiliki arti memberi atau pemberian. Secara etimologis hibah memiliki arti melewatkan, menyalurkan atau juga bisa memberi.¹ Perkataan hibah yang memiliki arti memberi terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Imron ayat 38 yang berbunyi:²

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya: "Di sanalah Zakariya berdoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa"

Menurut istilah syariat, hibah merupakan akad yang substansinya adalah tindakan seseorang untuk mengalihkan kepemilikan harta bendanya untuk orang lain pada saat hidup tanpa imbalan.³ Sementara dalam Pasal 171 ayat 9 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwasannya “hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya.” Dari penjelasan diatas maka dapat kita ketahui unsur-unsur yang membangun sebuah transaksi hibah yaitu:

¹ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah & Waris* (Rumah Fiqih Publishing: Jakarta, 2019), 8-10.

² KEMENAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan ...*, 55.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), 547.

- Hibah juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Buku III dalam pasal 668 tepatnya point 9 bahwa “Hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apa pun.” Hibah tidak mengandung unsur pemberian yang bersifat timbal balik. Oleh karena itu, orang yang menerima hibah mendapatkannya secara cuma-cuma.⁴

Hukum hibah adalah mandub (dianjurkan). Hibah merupakan salah satu bentuk perbuatan saling tolong menolong yang sangat dianjurkan oleh syariat Islam.⁵ Adapun dasar hukum hibah, yaitu

QS An-Nisa (4) : 4:⁶

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

⁴ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Usaimin, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), 113.

⁶ KEMENAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan ...*, 77.

[illegible]

Artinya:“.....memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya...”

خَوْفٌ وَلَا رَبِّهٖمۡ عِنۡدَ أَجۡرِهِمۡ لَهُمۡ ۖ أَذًى وَلَا مَنَّا نَفَقُوا مَآ يَشۡعُرُونَ ۚ لَا تُمۡنَ إِلَّا بِٱللَّهِ سَبِيلُ ۚ فِى أَمْوَالِهِمۡ يُنْفِقُونَ ۚ ٱلَّذِينَ يَحۡزَنُونَ ۖ هُمۡ وَلَا عَلَیْهِمۡ

b. Hadis

- 1) Dari Khalid bin Hadi, Nabi Muhammad Saw bersabda “Barangsiapa mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan karena mengharap-harapkan dan meminta-minta, maka hendaklah ia menerimanya dan tidak menolaknya, karena ia adalah rezeki yang diberikan Allah kepadanya.” (HR Ahmad)
- 2) Dalam Riwayat Ibnu Abbas, dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Perumpamaan orang-orang yang menyedekahkan suatu sedekah, kemudian menarik Kembali pemberiannya, adalah seumpama anjing yang muntah, kemudian memakan muntahnya”. (HR Muslim)

[illegible]

3. Rukun dan Syarat Hibah

Adapun rukun hibah menurut mayoritas ulama terdapat empat hal yaitu:⁹

a. Pemberi Hibah (*al-wahib*)

Pemberi hibah adalah pemilik barang ketika dalam kondisi sehat dan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap urusannya. Hibah mempunyai akibat kepemilikan hak milik. Pemberi hibah dituntut sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihibahkan. Oleh karena itu perbuatan hibah akan batal jika seseorang menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya.

b. Penerima Hibah (*al-mauhub lah*)

Adapun orang yang diberi (*al-mauhub lah*) maka bisa siapa saja. Kesepakatan ulama bahwasannya seorang boleh memberikan seluruh hartanya kepada orang lain yang bukan kerabatnya. Dengan tidak adanya ketentuan siapa yang berhak menerima hibah, maka hibah bisa diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Disyaratkan bagi penerima hibah benar-benar ada bila benar-benar tidak ada diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka tidak sah.

c. Benda yang diberikan

Merupakan barang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Pada hakikatnya segala jenis benda yang bisa dihibahkan adalah benda yang boleh diperjualbelikan.

⁹ Hanif Luthfi, *Hibah Jangan Salah!* (Senarai Pustaka: Jakarta, 2020), 40-44.

d. Sighat (Ijab-Qabul)

Ijab dan Qabul yaitu ucapan dari orang yang bisa berbicara dan termasuk ijab yang jelas jika dia mengatakan: “saya hibahkan kepada kamu, saya berikan kepadamu, saya jadikan milikmu tanpa bayaran, saya menjadikan binatang ini sebagai tungganganmu” dan lain-lain. Termasuk qabul yang jelas seperti ucapan: “saya terima, saya ridha”, yang semua ini diucapkan dengan niat hibah.

Adapun syarat hibah terdapat pada pemberi hibah, penerima hibah, barang yang dihibahkan dan ijab qabul. Masing-masing memiliki syarat sebagai berikut:¹⁰

- a. Syarat pemberi hibah adalah orang yang mempunyai kewenangan untuk memberi barang yang dihibahkan, yaitu berakal, baligh dan menjaga harta. Hibah merupakan pemberian secara cuma-cuma sehingga tidak sah apabila pemberian dari anak kecil dan orang gila, karena keduanya tidak mempunyai kewenangan untuk memberi secara sukarela, mengingat hal itu merupakan kerugian murni. Selanjutnya pemberi hibah tidak dalam keadaan terpaksa yakni memberikan hibah atas dasar kemauan sendiri dengan penuh kerelaan tanpa ada paksaan dari pihak lain.
- b. Syarat penerima hibah adalah benar-benar ada ketika hibah diberikan. Apabila penerima hibah sama sekali tidak ada atau baru dianggap ada, misalnya dia masih berbentuk janin, maka hibah tersebut tidak sah. Namun

¹⁰ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), 20-22.

c. Syarat benda yang dihibahkan yaitu: *pertama*, benda tersebut ada ketika sewaktu penghibahan. Tidak sah menghibahkan sesuatu yang tidak ada ketika akad, misalnya menghibahkan anak-anak ternak kambingnya yang akan lahir pada tahun ini. *Kedua*, benda tersebut bernilai dan bisa dimiliki artinya kepemilikan berlaku atas barang yang dihibahkan dan kepemilikannya dapat dipindahkan dari pihak satu ke pihak yang lain serta bukan benda milik umum. Misal, tidak sah menghibahkan air sungai, ikan di laut, burung di udara atau masjid dan mushola. *Ketiga*, benda tersebut milik pemberi hibah, maka tidak sah suatu penghibahan jika seseorang memberikan kepemilikan atas suatu benda yang bukan miliknya untuk orang lain. *Keempat*, adanya penerimaan terhadap barang hibah, karena dengan adanya penerimaan maka ada hibah. Kelima, pengambilan barang hibah oleh si penerima hibah harus dengan seizin pemberi.

d. Syarat sighat yakni bersambungannya antara qabul dengan ijab tanpa adanya pemisah yang secara syara' dianggap berpengaruh terhadap keabsahan ijab qabul tersebut.

Dikutip dari kitab *Fiqh al-Sunnat Sayyid Sabiq* menerangkan bahwa adanya perbedaan pendapat ulama perihal menghibahkan semua harta:

oenerima hibah). Misalnya, belajar kerja, akan tetapi tidak diperbolehkan mencabut kembali tambahan yang bersifat terpisah, seperti upah kerja, anak budak, dan kandungan yang terjadi di masa kepemilikan anaknya.¹¹

5. Macam-Macam Hibah

Pada umumnya hibah dibagi menjadi 2 macam yakni:¹²

a. Hibah Umri

Umri dapat diartikan sebagai umur, sumber pemberian umri berasal dari perbuatan orang-orang Arab sejak zaman jahiliyyah, kemudian ditetapkan atau dilestarikan keberlakuannya oleh Islam. Hibah umri merupakan hibah yang disyaratkan selama orang yang diberi hibah masih hidup. Misalnya, seseorang melakukan perbuatan hibah yakni memberikan sebuah rumah kepada orang lain dengan syarat ketika si penerima hibah meninggal dunia, maka rumah yakni objek hibah tersebut kembali kepada si pemberi hibah.

b. Hibah Rugby

Hibah ruqbi dapat dikatakan sebagai hibah bersyarat. Perbuatan hibah dilakukan dengan adanya suatu persyaratan. Seperti lafadz *arqabtuka lahu* (aku ruhbahkan ia padamu) atau *ja 'altuhu laka ruqbi* (aku jadikan ia bagimu ruqbi). Namun hibah ini tidak sah jika digantungkan dengan sesuatu yang tidak jelas. Misalnya, “*Apabila awal bulan Ramadhan tiba,*

¹¹ M. Sulaeman Jajuli, *Fiqh Madzhab Ala Indonesia (Dalam Wasiat dan Hibah)* (DEEPUBLISH: Yogyakarta, 2015), 133-134.

¹² Ibid., 124-129

a. Objek wajib *ḍamān* berada pada perjanjian (*zimmah*). Gugurnya kewajiban ditandai dengan adanya pemenuhan atau pembebasan oleh pihak yang berhak menerima ganti rugi tersebut. Pihak yang dirugikan berhak melaporkan penyebab kerugian ke Pengadilan supaya terpenuhi hak-haknya. Menurut tradisi fuqoha bahwasannya *zimmah* merupakan suatu sifat yang membuat seseorang memiliki kompetensi untuk melakukan kewajiban dan menerima hak-haknya. *Ahlu zimmah* adalah pihak-pihak yang melakukan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak.

c. Sebab-sebab *ḍamān* adalah adanya unsur *ta'addi* yaitu melakukan perbuatan terlarang dan tidak melakukan kewajiban menurut hukum. Ta'addi terjadi karena melanggar perjanjian dalam akad yang semestinya harus dipenuhi.

¹⁴ Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah* (Jakarta: Kencana, 2018), 144-147.

b. Hadis

الزَّعِيمُ غَارِمٌ

[illegible]

- 1) pihak penjamin (kafil)
- 2) pihak yang dijamin (Makful)
- 3) objek penjaminan atau hutang (Makful alaih)
- 4) ijab kabul (sighat)\

- a) kafālah bi an-nafs, merupakan akad yang memberikan jaminan atas dirinya (personal guarantee)
- b) kafālah bil mal, merupakan jaminan pembayaran hutang atas pelunasan hutang
- c) kafālah bit taslim, jaminan untuk atas peminjaman barang persewaan pada waktu masa sewa tertentu dan akan dikembalikan ketika barang sewa dikembalikan ke penyewa
- d) kafālah al-munjazah, jaminan yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan tertentu
- e) kafālah al-mualaqah, jaminan yang dibatasi atas jangka waktu tertentu dan untuk tujuan tertentu pula.

Rahn menurut bahasa berarti *al-thubūt* (tetap), *al-habs* (penahanan), *al-dawain* (lama), dan *al-luzūm* (harus). Sedangkan menurut istila syara' ialah menaruh barang (dijadikan) sebagai uang, untuk penguat perjanjian hutang dan barang tersebut akan dapat sebagai pelunas hutang ketika pihak

Dalam fatwa DSN-MUI nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 sebuah barang jaminan dapat dilakukan eksekusi ketika pemberi jaminan/ debitur telah melakukan perbuatan moral *hazard*. Sebuah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai moral hazard antara lain:

- 1) *Ta'addi (ifrath)*, yaitu debitur melakukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan
- 2) *Taqshir (tafrith)*, debitur tidak melakukan perbuatan yang telah dipersyaratkan dalam perjanjian
- 3) *Mulkhalafat al-Syuruth*, debitur melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan yang telah ia sepakati

1. Pencabutan Hibah Menurut Fiqih

Pencabutan hibah adalah merupakan perbuatan yang diharamkan walaupun hibah tersebut terjadi antara dua orang yang bersaudara ataupun suami isteri. Adapun pencabutan hibah hanya dapat dilakukan atau diberikan

²⁰ Soebekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1978), 29.

2. Pencabutan Hibah Menurut KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam pencabutan hibah dijelaskan pada BAB IV Pasal 212 bahwasannya “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orangtua kepada anaknya”. Selain itu juga dijelaskan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembatasan pemberian hibah diatur dalam Pasal 210 yang menyatakan: “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.

Dalam hukum Islam terdapat ketentuan bahwasannya pembagian atau pemberian harta sebelum seorang meninggal atau lebih dikenal dengan hibah atau wasiat, tidak diperbolehkan melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta warisannya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut prinsip bahwa hibah hanya diperbolehkan dilakukan sebanyak $\frac{1}{3}$ dari harta kekayaan yang dimiliki. Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Prinsip yang dianut pada Kompilasi Hukum Islam adalah yang sesuai dengan kultur bangsa Indonesia, serta sesuai dengan pendapat yang dikemukakan mahdzab Hanafi bahwa orang yang memberika semua hartanya kepada orang lain adalah orang yang dungu dan tidak layak untuk bertindak hukum. Oleh karena orang yang bertindak merupakan orang yang tidak cakap hukum sehingga perbuatan hukum (hibah) yang dilakukan batal demi hukum. Hal ini dikarenakan ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan. Jika perbuatan yang dilakukan tersebut dihubungkan dengan kemaslahatan bagi

Firman Allah dalam Q.S al-azhab: 33 yang dirumuskan dalam beberapa garis hukum dan bagi setiap orang: “*Kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta ibu bapaknya yang tadinya (akan mewarisi harta peninggalan itu)*”. Dalam hukum Islam memang dianjurkan bagi umatnya untuk beramal baik, menghibahkan Sebagian hartanya di jalan Allah dengan ketentuan tidak boleh mengabaikan atau menghilangkan nasib keluarga atau ahli warisnya.²⁵

3. Pencabutan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

²⁴ Muhammad Ulil Abshor, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 116.

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 112-113.

[illegible]

hibah, di dalam KHEs diatur pada bab IV tentang hibah, yaitu mulai dari pasal 685 sampai dengan pasal 727, termuat dalam 43 pasal.

Sedangkan dalam hal pencabutan hibah diatur khusus pada Bagian Ketiga tentang Menarik Kembali Hibah pasal 709-723. KHES terkait pencabutan hibah ada yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan berdasarkan syarat dan ketentuan masing-masing. Pencabutan hibah diperbolehkan tertuang dalam KHES pasal 712 yakni *“Penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat si penerima menyetujuinya.”* Kemudian dijelaskan pada pasal 713 *“Apabila wahib menarik kembali mauhub yang telah diserahkan tanpa ada persetujuan dari mauhub lah, atau tanpa keputusan Pengadilan, maka wahib ditetapkan sebagai perampas barang orang lain; dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada di bawah kekuasaannya, maka ia harus mengganti kerugian.*

BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM

DALAM PUTUSAN NOMOR: 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr.

TENTANG PENCABUTAN HIBAH ATAS BARANG JAMINAN

A. Profil Pengadilan Agama Mojokerto

1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Mojokerto

Pengadilan Agama Mojokerto sebagai Pengadilan dibawah naungan Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dan kewajiban yang sama untuk mengusung terwujudnya peradilan yang baik dan benar serta dicintai masyarakat. Atas dasar itu maka Pengadilan Agama Mojokerto telah menjabarkan visi dan misi tersebut dalam visi dan misi Pengadilan Agama Mojokerto. Visi Pengadilan Agama Mojokerto adalah :“Terwujudnya Pengadilan Agama Mojokerto Yang Agung”. Hal ini mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Mojokerto siap bersama-sama peradilan lainnya meningkatkan kinerja yang lebih baik demi menjaga kehormatan dan martabat serta wibawa peradilan yang didedikasikan dalam bentuk Misi Pengadilan Agama Mojokerto, yaitu:¹

- Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Mojokerto.
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Mojokerto, (Tentang Pengadilan Profil Satuan Kerja), <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi>, diakses pada tanggal 07 Mei 2021.

- ## Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Mojokerto

Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam Struktur Organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

- a. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- b. Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.
- d. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

[illegible]

Kecamatan yang terdiri dari 18 Kelurahan dan wilayah Kabupaten meliputi 18 Kecamatan yang terdiri dari 5 kelurahan dan 299 Desa.³

B. Duduk Perkara Kasus Dalam Putusan Nomor: 2217/Pdt.G/2019/Pa.Mr.

Pada kasus yang terjadi di Mojokerto tentang pencabutan hibah atas barang jaminan telah dijatuhkan putusan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriyyah yang kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020. Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriyyah. Dalam perkara ini hakim yang memeriksa dan mengadili adalah Drs. Abdullah Shofwandi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mulyani, M.H. dan Kamali S. Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota.⁴

Sengketa tersebut berawal dari adanya wanprestasi dalam akad pembiayaan KPR Pas iB di salah satu Bank Syariah dengan objek jaminan yang bermasalah yakni objek hibah yang telah dicabut.

1. Para Pihak yang Bersengketa

Praktik hibah yang dilakukan oleh umat manusia pada dasarnya tujuannya untuk mempererat hubungan baik di antara sesamanya, termasuk hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya juga ditujukan sebagai ungkapan kasih sayang orang tua terhadap anak. Walaupun mempunyai tujuan mulia, bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak ada masalah di dalamnya yang bisa menimbulkan sengketa di antara mereka dan bahkan

³ Ibid.

⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Putusan Nomor: 2217/Pdt.G/2019/Pa.Mr.*, 74-75.

No.	Pihak	Hubungan Penggugat-Tergugat	Usia	Pekerjaan	Agama
1.	Penggugat I	Ibu dari Penggugat III dan Tergugat II	59	Ibu Rumah Tangga	Islam
2.	Penggugat II	Ayah dari Penggugat III dan Tergugat II	63	Pensiunan	Islam
3.	Penggugat III	Anak kedua dari Penggugat I dan Penggugat II	35	karyawan swasta	Islam
4.	Tergugat I	Menantu dari Penggugat I dan Penggugat II	38	karyawan swasta	Islam
5.	Tergugat II	Anak pertama dari Penggugat I dan Penggugat II	37	Ibu Rumah Tangga	Islam
6.	Tergugat III	Bank Syariah			
7.	Tergugat IV	Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Mojokerto			

[illegible]

berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Pertimbangan Kompetensi Absolut dan Relatif

Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syaria’h”.

Atas gugatan Penggugat menyebutkan bahwa gugatan tersebut adalah gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakan para Tergugat bermula dengan adanya akad antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III, obyek dan subyek gugatan ini di wilayah Hukum Kabupaten dan atau Kota Mojokerto, oleh karenanya maka Pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.⁸

Dalam perkara ini Para Penggugat mengajukan Gugatan Ekonomi Syariah Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan sebagaimana terurai di atas, dimana dalam jawabannya, Para Tergugat selain menanggapi pokok perkara, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI juga mengajukan eksepsi. Maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI.⁹

⁸ Ibid., 65.

⁹ Ibid., 65.

3. Pertimbangan dalam Eksepsi

Pihak Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagaimana terurai di bawah ini yaitu tidak menyangkut ekspesi tentang kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan dan mengadili eksepsi Tergugat ini bersama dengan putusan akhir. Berikut eksepsi diantara para tergugat:¹⁰

- a) Eksepsi Tergugat III pada intinya menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas, Penggugat tidak secara detail dan cermat menguraikan satu per satu dari unsur Perbuatan Melawan Hukum yang digugat kepada Tergugat III, dan gugatan Penggugat kabur karena tidak menjelaskan perbuatan Tergugat III berkaitan dengan gugatan a quo, permasalahan yang ada lebih kepada kewarisan antara Para Penggugat dengan Tergugat II serta keluarganya, oleh karenanya sudah selayaknya gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak-tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
- b) Eksepsi Tergugat V pada intinya menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal mengajukan gugatan, gugatan Penggugat mengandung error in persona (salah orang/pihak yang harus digugat, mengalami kerancuan, ketidakjelasan (obscure labels), posita gugatan tidak ada satupun dalil yang mendalilkan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dalam Petitum-nya Penggugat

¹⁰ Ibid., 65.

c) Eksepsi Tergugat VI pada intinya menyatakan gugatan Penggugat Obscuur Libel, dalam posita Para Penggugat sama sekali juga tidak menyebutkan hal- hal atau dasar hukum dari kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat VI, namun di dalam petitumnya tiba-tiba menuntut Tergugat VI untuk dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena Tergugat VI tidak ada keterkaitan dengan perkara a quo maka mohon dikeluarkan dari pihak dalam perkara ini, oleh karenanya sudah selayaknya gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak-tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

[illegible]

- Tanah (PPAT) Kota Mojokerto, dan selanjutnya diterbitkan Hak Tanggungan (SHT) Nomor : 758/2015 tertanggal 2015 oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto.
- v. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar kewajibannya terhadap Tergugat III, maka Tergugat III memberikan peringatan sebanyak 3 kali yaitu tanggal 14 Januari 2016 (bukti T.III. 8), tanggal 01 Juli 2016 (bukti T.III. 10) dan 14 Agustus 2016 (bukti T.III. 11) dan kemudian Tergugat III memberitahukan tentang Penjualan Melalui Lelang I, tanggal 14 Oktober 2018 (bukti T.III. 13) lalu Lelang II tanggal 1 Oktober 2019 (bukti T.III. 14) yang kemudian berujung kepada Permohonan

v. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya terhadap Tergugat III, maka Tergugat III telah memberikan peringatan sebanyak 3 kali yaitu tanggal 03 Juni 2016 (bukti T.III. 9), tanggal 01 Juli 2016 (bukti T.III. 10) dan ; tanggal 11 Agustus 2016 (bukti T.III. 11) dan kemudian Tergugat III memberitahukan tentang Penjualan Melalui Lelang I, tanggal 29 Januari 2018 (bukti T.III. 13) lalu Lelang II tanggal 1 Oktober 2018 (bukti T.III. 14) yang kemudian berujung kepada Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Tergugat III, tanggal 24 Juni 2019, dan didaftar Nomor : 003/Pdt.Eks/2019/PA.Mr. tanggal 27-05-2019 (bukti T.III. 15).

- sby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- b. Bertentangan dengan hak/melawan hak subyektif menurut Undang-Undang.
- c. Bertentangan dengan tata susila.
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Sebelum mempertimbangan satu persatu tuntutan Penggugat, setelah memcermati posita gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat sebagaimana fakta-fakta hukum yang ada, Majelis perlu mempertimbangkan bahwa dasar pokok Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah oleh karena hibah Penggugat I kepada Tergugat II yang telah dilakukan sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah Nomor : 235/Mgr/2009 tanggal 20 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan notaris telah dicabut sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Nomor : 0541/Pdt.G/2018/PA.Mr Tanggal 11 Juli 2018, sehingga segala akibat yang tersangkut dengan tindakan hukum berkaitan dengan subyek dan obyek perkara bertentangan dengan hukum sehingga perbuatan yang bersangkutan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.¹⁶

¹⁶ Ibid., 72.

Proses hibah Penggugat I kepada Tergugat II sudah cukup lama terjadi sebelum Tergugat I dan Tergugat II menjadikan harta hibah / objek perkara sebagai agunan pada Tergugat III. Majelis berpendapat bahwa pembatalan hibah tersebut tidak dengan serta merta membatalkan semua transaksi dan atau perbuatan hukum yang telah terjadi sebelum pembatalan hibah terjadi, hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dinyatakan, “Gugatan Pencabutan hibah dari orang tua kepada anak yang objek tersebut masih dalam jaminan utang pada lembaga keuangan syariah harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dapat merugikan pihak ketiga”.

Dalam posita 2 gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat menuntut seluruh akad dan perjanjian atas Fasilitas Pembiayaan yang

[illegible]

Penggugat tidak mempermasalahkan adanya proses sampai akhirnya terjadinya eksekusi hak tanggungan oleh Tergugat VI. Penggugat telah mengakui adanya proses Hibah yang dilakukan kepada Tergugat II, oleh karenanya Majelis menganggap bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai suami isteri memiliki hak penuh atas harta yang dihibahkan oleh Penggugat sepanjang hibah tersebut tidak dicabut atau dibatalkan oleh pemberi hibah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya sebagaimana amar putusan. Oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini dibebankan kepada Para Penggugat. Berikut pertimbangan hakim terhadap tuntutan yang dituangkan dalam petitum Penggugat:

[illegible]

Kemudian, diikuti analisis hakim perihal hukum apa yang diterapkan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Bertumpu dari analisis itu, pertimbangan dilakukan dengan argumentasi yang rasional dan objektif, pihak mana yang dapat membuktikan dalil gugatan dan bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto dengan nomor: 2217/Pdt.G/2019/Pa.Mr analisis dalam putusan hakim yang dimaksud adalah sebagai berikut :

³*Ibid.*, 901.

Dalam Eksepsi

Berdasarkan kasus diatas dapat dipahami bahwa selaku Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas, Penggugat tidak secara detail dan cermat menguraikan satu per satu dari unsur Perbuatan Melawan Hukum yang digugat kepada Tergugat III, dan gugatan Penggugat kabur karena tidak menjelaskan perbuatan Tergugat III berkaitan dengan gugatan a quo, permasalahan yang ada lebih kepada kewarisan antara Para Penggugat dengan Tergugat II serta keluarganya. Kemudian Penggugat memberikan tanggapan tetap pada gugatannya bahwa gugatannya merupakan gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat III karena menilai eksepsi berisi penilaian terhadap pokok perkara.

Menurut penulis tindakan Majelis Hakim benar dan tepat karena eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang terkait dengan syarat-syarat atau formalitas gugatan yakni apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah. Keberatan yang diajukan dalam eksepsi tidak ditujukan untuk menyinggung bantahan terhadap pokok perkara. Bantahan terhadap pokok perkara diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi.

Dalam Pokok Perkara

Pada perkara Nomor: 2217/Pdt.G/2019/Pa.Mr. sebagaimana yang terdapat dalam tuntutan penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2019.

Berdasarkan bukti P.3 (Fotocopy Salinan putusan, Nomor 541/Pdt.G/2018/PA.Mr, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto), Majelis Hakim menimbang bahwa pembatalan hibah perkara a quo belum mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka segala proses yang berkaitan dengan obyek perkara yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan

Menurut penulis, akta perdamaian itu bisa dilaksanakan ketika pembiayaan yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II lunas. Hal ini dikarenakan objek hibah masih dibebankan pada hak tanggungan. Hak tanggungan tidak bisa dicabut karena sifatnya aksesoir yang mana dapat selesai

Selanjutnya, berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi akta hibah, No. 235/Mgr/2009, yang dikeluarkan oleh Notaris Haji Raden Soehartedjo, S.H.,M.H., tanggal 20 Oktober 2009), tidak adanya perjanjian hibah bersyarat yang mana telah dituntutkan Penggugat dalam surat gugatannya agar “Obyek Sengketa” tersebut dikemudian hari tidak dijual ataupun dijadikan sebagai jaminan hutang- piutang karena “Obyek Sengketa” yang dihibahkan tersebut akan dianggap sebagai harta peninggalan (warisan) apabila Penggugat I dan Penggugat II dikemudian hari telah meninggal dunia. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan: “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.

Menurut penulis, pertimbangan hakim mengesampingkan keterangan para saksi benar dan tepat. Pada prinsipnya alat bukti saksi merupakan penyempurnaan alat bukti tulisan. Sesuai dengan Pasal 1902 KUH Perdata yakni dalam hal suatu peristiwa atau hubungan hukum menurut undang-undang hanya dapat dibuktikan dengan tulisan atau akta, akan tetapi alat bukti tulisan itu hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan, penyempurnaan pembuktiannya dapat ditambah dengan saksi. Adapun syarat sah suatu alat bukti keterangan saksi yang dapat dijadikan landasan sumber pengetahuan merujuk Pasal 1907 KUHPerdata antara lain: (1) Berdasarkan pengalaman sendiri (2) Berdasarkan penglihatan saksi sendiri (3) Berdasarkan pendengaran saksi sendiri. Dalam perkara ini saksi mengetahui tentang proses hibah dan adanya persyaratan (hibah bersyarat) adalah karena diberitahu oleh Para Penggugat. Maka sudah selayaknya hakim mengesampingkan bukti keterangan saksi tersebut karena tidak memenuhi kriteria pasal diatas.

Pertimbangan Hukumnya dan Putusan

Majelis Hakim dan diakhiri dengan putusan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perkara Nomor: 2217/Pdt.G/2019/Pa.Mr.

Berikut ini penulis menganalisis putusan mengenai perkara pencabutan hibah atas barang jaminan sebagaimana putusan Pengadilan Agama Mojokerto yang mengadili perkara perdata agama pada persidangan tingkat pertama yang tertuang pada putusan nomor 2217/Pdt.G/2019/Pa.Mr.

Akad pembiayaan *mushārahah mutanaqishah* dalam perkara a quo menimbulkan terjadinya hak dan kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Dalam hal ini jaminan digunakan dalam rangka pelunasan hutang nasabah. Berdasarkan Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman Implementasi Mushārahah Mutanaqishah Dalam Produk Pembiayaan dijelaskan bahwasannya pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan oleh para pihak melalui musyawarah mufakat dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), penambahan syarat baru (*reconditioning*), maupun penggunaan struktur baru (*restructuring*).

Menurut penulis, dalam perkara a quo lebih baik Tergugat III menggunakan alternatif penyelesaian pembiayaan dengan cara musyawarah mufakat terlebih dahulu dapat berupa cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), penambahan syarat baru (*reconditioning*), maupun penggunaan struktur baru (*restructuring*). Hal tersebut dirasa penting karena penyelesaian pembiayaan dengan menggunakan cara eksekusi objek jaminan merupakan sesuatu yang kurang tepat dan merupakan penyelesaian terakhir. Terlebih lagi dalam perkara

a quo objek jaminan yang dijadikan barang jaminan merupakan harta bawaan dari hibah bersyarat. Disamping itu, dalam konteks manajemen resiko Bank menilai calon debitur dari kemampuannya dalam melakukan pembiayaan bukan dari barang jaminannya. Mengingat fungsi pokok barang jaminan adalah pelunasan hutang bukan sebagai bukti bahwa nasabah itu mampu menyelesaikan pembiayaan. Jadi menurut penulis sesuai dengan Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 01/DSN-MUI/X/2013 lebih baik menggunakan alternatif penyelesaian pembiayaan untuk kemaslahatan para pihak.

Ketentuan penyertaan barang jaminan akan adanya suatu akad harus dipenuhi agar tetap berjalan dalam ketentuan-ketentuan syariah. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III2008 dijelaskan bahwa:

sesuai dengan KHI Pasal 212 dan 210 ayat (1). Hal ini dikarenakan objek hibah telah dibebankan hak tanggungan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis memberikan saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, segala sesuatu praktik transaksi yang mengakibatkan peralihan hak atas tanah atau benda apapun itu harus dicatat secara rinci dan yang jelas wajib untuk ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan. Selain itu, dalam hal mengajukan pembiayaan hendaknya lebih bertanggung jawab. Taat terhadap pemenuhan-pemenuhan kewajiban sesuai dengan perjanjian pembiayaan agar pihak Bank tidak sampai melelang barang jaminan.
2. Bagi Bank, dalam hal ini bank harus selalu mengutamakan prinsip tolong-menolong ketika nasabah dalam keadaan mampu membayar maupun mengalami penurunan kemampuan membayar. Bentuk prinsip tolong-menolong dalam konteks ketika nasabah mengalami pembiayaan macet atau penurunan kemampuan membayar adalah dalam bentuk alternatif penyelesaian pembiayaan melalui musyawarah mufakat dengan cara *rescheduling*, *reconditioning* maupun *restructuring* terlebih dahulu.
3. Bagi Majelis Hakim, dalam berpendapat hakim seyogyanya menggunakan diksi-diksi yang tepat agar tidak menimbulkan pemaknaan ganda yang dapat menimbulkan salah tafsir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdi, Djamal dan Silvana. “Implrvementasi Akad Mushārah mutanaqisah Terhadap Produk Pembiayaan KPR Syariah di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Makasar” dalam *Prosiding Seminar Nasional Institut Agama Islam Negeri Parepare*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Abshor, Muhammad Ulil. *Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Maktabah al-‘Isriyah,t.t
- Ajib, Muhammad. *Fiqh Hibah dan Waris*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019.
- al-Usaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Apriyanto, et al. *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Arto, Mukti dan Ermanita Alfiah. *Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI. *Buku Standar Produk Perbankan Syariah Mushārah mutanaqisah*. Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Jakarta: t.tp., 2016.
- Fitrah dan Lutfiyah. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jajuli, Sulaeman. *Fiqh Madzhab Ala Indonesia (Dalam Wasiat dan Hibah)* (DEEPUBLISH: Yogyakarta, 2015), 133-134.
- , Sulaeman. *Ekonomi Dalam Al-Qur’an*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Jayanti, Putri Dewi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Tranksaksi Mushārah Di Pengadilan Agama Surakarta: (Studi Putusan Nomor 749/Pdt.G/2015/PA.Ska)*. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- KEMENAG RI. *Al Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2004.
- Kompilasi Hukum Islam, pasal 171, Jakarta: Media Center,2006.

- Kurnia, Alaika M. Bagus dan Khoirul Muaddib, *Fikih Mawaris*. Sukabumi: Haura Utama, 2020.
- Kusuma, Nida Lintang. *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.SKA Tentang Kedudukan Barang Jaminan Dalam Transaksi Murabahah*. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.
- Luthfi, Hanif. *Hibah Jangan Salah!*. Senarai Pustaka: Jakarta, 2020.
- Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Mardani. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentamappiasng Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: DKU Print, 2013.
- . *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada: Depok, 2014.
- . *Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah Litigasi dan Nonlitigasi*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Pranadita, Nugraha. *Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Prinsip Syariah dan Implementasinya Pada Negara dan Kesejahteraan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara No. 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr.
- Sanggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.
- Sholihudiin, Muh. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Soebekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1978.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Sunarsa, Sasa. *Penelusuran Kualitas dan Kuantitas Sanad Qira'at Sab'*. Jawa Tengah: CV Mangku Bumi, 2020.
- Syarif, Ade Apriani. *Tinjauan Terhadap Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor:*

432/Pdt.G/2012/PA.Prg). Skripsi--Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

Tim Penyusun Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya. "Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel". Surabaya: Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Zakariyah,M. Askari, et al. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development*. Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warahmah, 2020.

Jurnal

Fitriani, Ifa Latifa. 2016. Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional: *Jurnal Hukum & Pembangunan*, No. 1.

Kartika, Rini Fatma. *Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah (Kafalah Dan Rahn)*, Kordinat: Vol. XV No. (2 Oktober 2016).

Internet

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Mojokerto. Tentang Pengadilan Profil Satuan Kerja, <http://www.new.pamojokerto.go.id/tentang-pengadlan/profile-pengadilan/visi-dan-misi>, diakses pada tanggal 07 Mei 2021.